



lintang zahra <lintangzahra2000@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filing LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Kepada: lintangzahra2000@gmail.com

4 April 2019 12.40

Yth. Sdr Mulyono

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : Mulyono
Jabatan : Kepala Biro Umum
Bidang : Yudikatif
Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2018

Berdasarkan data yang kami miliki bahwa laporan LHKPN terdahulu Saudara tercatat tidak lengkap, oleh karena itu mohon segera mencetak dan menandatangani di atas meterai setiap nama dalam Surat Kuasa yang terlampir dalam email ini dan mengirimkannya ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Apabila Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh di halaman Riwayat Harta dan Data Keluarga aplikasi e-Filing LHKPN.

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



IkhtisarHarta-04042019124099289245.docx

60K

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : MULYONO

Tempat/Tanggal Lahir : KEBUMEN / 1 Januari 1960

Nomor KTP/NIK : 3275080101600054

Alamat : ALMADANIAH I NO. 21, JATICEMPAKA , PONDOK GEDE , BEKASI , JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



04-April-2019
Pemberi Kuasa,



(MULYONO)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

***) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama : MULYONO

Tempat/Tanggal Lahir : KEBUMEN / 1 Januari 1960

Nomor KTP/NIK : 3275080101600054

Alamat : ALMADANIAH I NO. 21 , JATICEMPAKA , PONDOK GEDE , BEKASI , JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa. -----

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/ atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



04-April-2019
Pemberi Kuasa,

*) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(MULYONO)